

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN DESA PESISIR
TANGGUH (PDPT) TAHUN 2012-2014 DI KABUPATEN KENDAL**

Oleh:

Andi Bayu Mukti Wicaksono

(14010111140121)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : fisip@undip.ac.id

Abstract

Kendal is a regency with a wide coastal and marine area. However, the coastal communities in Kendal are usually being excluded and did not get any attention from the government. The quality of environmental, infrastructure and income of the people in the coastal village of Kendal is quite low. It surely needs such an attention by the government, because it accounts for a high poverty rate in this area. This problems are eventually got the attention of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. MMAF had develop the Resilient Coastal Rural Development program (PDPT). The purpose of this program are to reorganize and improve the village life. This program is focused on the developing the human resource, infrastructure of coastal areas and supporting the development of productive economic business climate.

In order to reveal the problems and the purposes of the study, researchers uses a qualitative descriptive approach. In analyzing the data, the researcher used the descriptive-qualitative. The purpose of the study is to find out how the implementation of the Rural Development Program of the Resilient Coastal is

applied in Kendal. The data obtained is used to formulate a recommendation as a form of suggestion for the sustainability of coastal development in Kendal.

The result showed that in order to develop the coastal areas in Kendal, local governments should encourage the participation of the community to participate in the development process. It means that the community itself that should carry out activities, starting from planning, implementing until the monitoring. Based on the research, the implementation of PDPT program was considered as good enough, refers to the variable of the implementation of the program. The purpose of this program have been accomplished, it can be seen from the improvements in the quality of infrastructure, rural financial independence through BUM-Des and the creation of productive business climate in the coastal village. However, there are shortcomings in its implementation namely the purpose of the programs which related to the group empowerment that shifted to the individual empowerment. It is characterized by the dissolution of most Coastal Communities Group (KMP) organizations after the program ends.

The recommendations that can be given are: the preparation must be done thoroughly before the program is actually applied, so that the community could understand about the technical implementation of the program. In addition, it needs such a seriousness and commitment of all parties to develop the coastal villages, so that the implementation will not only be considered to accomplish such a budget absorption target.

Keywords: Program Implementation, Resilient Coastal Village Development

A. PENDAHULUAN

Di negara berkembang seperti di Indonesia, pemerintah sangat giat dalam rangka melaksanakan pembangunan. Untuk melaksanakan fungsi pembangunan tersebut, maka pemerintah harus menciptakan produk kebijakan publik yang bertujuan untuk mencapai tujuan nasional. Kebijakan kaitannya dengan pembangunan tersebut seharusnya tidak mengalami ketimpangan antara kota

dengan daerah pedesaan. Di Indonesia pembangunan sering kali hanya terpusat di kota, sedangkan desa masih banyak yang belum tersentuh pembangunan. Pembangunan juga belum banyak dilakukan di desa-desa pesisir, yang mana di wilayah itu juga tersimpan potensi kemiskinan yang cukup tinggi.

Kabupaten Kendal merupakan salah satu daerah yang memiliki wilayah pesisir dan laut yang cukup luas. Dilihat dari kondisi geografis, Kabupaten Kendal memiliki pantai sepanjang 41,0 Km, terbentang di beberapa Kecamatan. Dari beberapa Kecamatan tersebut, mayoritas yang masuk kedalam wilayah pesisir, adalah wilayah pedesaan. Melihat wilayah pesisir cukup luas, masyarakat pesisir di Kabupaten Kendal kerap tersingkirkan dan tidak mendapat perhatian dari pemerintah pusat maupun daerah. Dilihat dari beberapa desa di wilayah pesisir Kendal, kebutuhan akan fasilitas umum dan penunjangnya yang masih belum terpenuhi. Realitas desa-desa pesisir dihadapkan pada empat persoalan pokok, yakni tingginya tingkat kemiskinan masyarakat pesisir, kerusakan sumber daya pesisir, rendahnya kemandirian organisasi sosial desa, serta minimnya infrastruktur dan kesehatan lingkungan di pemukiman desa. Didukung dari data KKP yang mencatat bahwa angka kemiskinan desa pesisir di Indonesia pada tahun 2010 mencapai 7,8 juta jiwa tersebar di 10.640 desa pesisir. Hal tersebut tentunya perlu mendapat sorotan, mengingat Kabupaten Kendal berada di daerah pesisir Laut Jawa.

Permasalahan tersebut akhirnya mendapat perhatian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Melalui Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, KKP mengembangkan Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT). PDPT adalah bagian pelaksanaan program PNPM Mandiri-Kelautan dan Perikanan yang diatur dalam melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.07/MEN/2012. Bentuk program ini adalah bantuan pengembangan manusia, sumber daya, infrastruktur, usaha dan siaga bencana dan perubahan iklim. Program PDPT bertujuan untuk menata dan meningkatkan kehidupan desa pesisir berbasis masyarakat, memfasilitasi peran masyarakat sebagai agen pembangunan kelautan dan perikanan. Program ini fokus pada kegiatan Bina Manusia; Bina Usaha dan Sumberdaya; Bina Lingkungan dan

Infrastruktur; dan Bina Siaga Bencana dan Perubahan Iklim. Tujuan dari kegiatan tersebut diharapkan akan bermuara pada pengentasan kemiskinan, khususnya pada masyarakat pesisir. Desa-desa di Kabupaten Kendal yang menerima program ini terdapat di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu, Desa Turunrejo dan Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong, sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor: 523/89/2012 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Desa Pesisir Tangguh di Kabupaten Kendal.

Permasalahan yang kemudian akan dibahas adalah bagaimanakah implementasi Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Kendal pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Kendal. Sehingga dari kajiannya nanti akan dapat dirumuskan rekomendasi dalam membangun wilayah pesisir di Kabupaten Kendal yang berkelanjutan .

Teori yang digunakan peneliti untuk menganalisis data adalah Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, serta Desa dan Pengembangan Desa. Teori-teori tersebut sangat diperlukan peneliti agar mampu mengerti seluk beluk program tersebut. Sehingga peneliti mampu mengetahui jalannya program PDPT dengan menggunakan indikator implementasi kebijakan model Donald Van Metter dan Carl Van Horn yang meliputi indikator Standar dan Sasaran Program, Sumber Daya, Komunikasi, Karakteristik Agen Pelaksana, Disposisi Implementator dan Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode observasi, wawancara serta dokumentasi, untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian. Peneliti mengambil sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal, anggota Tim Teknis PDPT di tingkat Kabupaten Kendal dan Koordinator Tenaga Pendamping PDPT di tingkat Kabupaten Kendal. Sedangkan informan kedua adalah Kepala Desa dan anggota Kelompok

Masyarakat Pesisir (KMP) di masing-masing lokasi penelitian yang dianggap tahu tentang jalannya program PDPT.

B. PEMBAHASAN

B.1 Standar dan Sasaran Program

Standar Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) tahun 2012-2014 tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri-KP dan Pedoman Teknis PDPT yang mengacu pada landasan hukum sebagai berikut:¹

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.07/MEN/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Tahun 2012
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 2/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Tahun 2013
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 10/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Tahun 2014
4. Peraturan Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Nomor: PER.04/KP3K/2012 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Desa Pesisir Tangguh Tahun 2012
5. Peraturan Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Nomor: 04/PER-DJKP3K/2013 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Desa Pesisir Tangguh Tahun 2013
6. Peraturan Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Nomor: 06/PER-DJKP3K/2014 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Desa Pesisir Tangguh Tahun 2014
7. Keputusan Bupati Kendal Nomor: 523/89/2012 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Desa Pesisir Tangguh di Kabupaten Kendal

¹ Pedoman Teknis PDPT tahun 2012,2013,2014

Dalam implementasinya, program PDPT dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan. Mulai dari pembentukan agen pelaksana seperti Tim Pengelola Kegiatan (Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Bendahara Pengeluaran), Tim Teknis, dan Tenaga Pendamping sampai dengan Lokakarya PDPT serta pelaporan. Serangkaian kegiatan PDPT tersebut telah dilaksanakan oleh implementator program PDPT di Kabupaten Kendal dan sudah mengikuti standar yang telah ditetapkan dalam pedoman teknis PDPT. Yang menjadikan kelebihan dari program PDPT adalah program PDPT terkesan lebih bersifat *bottom up*. Jadi seluruh kegiatan PDPT direncanakan, dilakukan dan diawasi sendiri oleh masyarakat. Sesuai dengan standar program yang telah ditetapkan yakni lebih mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan.

Sasaran program PDPT di Kabupaten Kendal adalah seluruh elemen masyarakat yang bermukim di desa Turunrejo, Purwokerto dan Wonorejo. Masyarakat yang sudah terbentuk dalam KMP diberikan pelatihan dan bantuan untuk memperoleh alternatif mata pencaharian melalui UKM. Selain itu masyarakat juga diberikan bantuan pembangunan infrastruktur serta perbaikan kualitas lingkungan. Namun dalam pelaksanaannya terkait dengan kegiatan Bina Usaha dan Sumberdaya terdapat pemasalahan. Sasaran program PDPT yang semula melalui penyediaan bantuan alat-alat usaha yang ditujukan untuk pemberdayaan kelompok, pada pelaksanaannya bergeser kepada pemberdayaan individu. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pendampingan kepada KMP lama. KMP lama yang terbentuk ditinggalkan, kemudian di tahun berikutnya membentuk lagi KMP baru dengan tidak melakukan pendampingan kepada KMP lama. Hal inilah yang kemudian menimbulkan lemahnya organisasi kelompok yang kemudian berdampak pada bubarnya sebagian besar organisasi KMP yang sudah terbangun.

B.2 Sumber Daya

Variabel sumberdaya ini merujuk pada ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya finansial dalam implementasi program PDPT. Pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi program PDPT di Kabupaten Kendal adalah

masyarakat yang tergabung dalam KMP, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Kendal. Selain itu civitas akademika dari Undip, LSM dan PKK. Masing-masing pihak tersebut memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Tenaga Pendamping beranggotakan dari unsur dinas Kelautan dan Perikanan yang mekanisme pembentukannya melalui seleksi. Tim Teknis beranggotakan SKPD terkait termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan. Sedangkan civitas akademika dari Undip berperan dalam pelatihan kelompok dalam rangka melaksanakan kegiatan program PDPT. Untuk kecukupan agen pelaksana, dengan personil yang ada sudah sangat mencukupi, dan memahami dan mengetahui tentang bagaimana dan apa saja yang harus mereka lakukan karena masing-masing pihak sudah memiliki tugas masing-masing. Pengelompokan tupoksi tersebut dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan kewenangan.

Dari sisi alokasi kucuran anggaran PDPT di Kabupaten Kendal pada tahun 2012 sebesar Rp 1.242.000.000,-. Kemudian pada tahun 2013 turun menjadi Rp 818.603.000,-. Keadaan yang sama juga terjadi pada tahun 2014, alokasi anggaran PDPT di Kabupaten Kendal juga turun menjadi Rp 633.750.000,-.² Penurunan alokasi anggaran pada program PDPT di Kabupaten Kendal terjadi karena fokus kegiatan PDPT yang berbeda pada setiap tahun anggarannya. Tahun pertama mendapatkan kucuran anggaran lebih besar karena pelaksanaannya fokus pada semua kegiatan PDPT yakni Bina Manusia; Bina Usaha dan Sumberdaya; Bina Lingkungan dan Infrastruktur; dan Bina Siaga Bencana dan Perubahan Iklim. Pada tahun 2013, fokus pada kegiatan Bina Siaga dan Perubahan Iklim, Bina Sumber Daya, dan Bina Lingkungan dan Infrastruktur. Sedangkan tahun terakhir fokus pada Bina Usaha dan Kelembagaan Desa. Untuk alokasi anggaran PDPT lebih banyak ditujukan untuk kegiatan Bina Lingkungan dan Infrastruktur, atau sekitar 50 % dari total keseluruhan anggaran PDPT pada setiap tahunnya dan alokasi anggaran terkecil ada pada kegiatan Bina Sumber Daya atau sekitar 3 % dari jumlah keseluruhan total alokasi anggaran PDPT. Keseluruhan alokasi

² Rekapitulasi Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) Kegiatan Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) Kabupaten Kendal

anggaran PDPT telah disalurkan kepada seluruh KMP dan sudah digunakan dengan tepat. Jumlah anggaran BLM PDPT juga sudah diterima penuh, artinya tidak ada potongan dari keseluruhan proses penyaluran BLM kepada KMP. Namun tidak adanya anggaran dari pusat maupun daerah untuk kegiatan pasca program dan anggaran pembinaan terkait kelembagaan membuat pelaksanaan PDPT menjadi timpang

B.3. Komunikasi

Selama pelaksanaan program PDPT di Kabupaten Kendal sudah terjalin komunikasi yang baik antar semua pihak yang terlibat. Selain membangun komunikasi dengan jajaran pemerintah, implementator program PDPT sudah berupaya untuk membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Dalam membangun komunikasi yang baik, Tenaga Pendamping yang sering bersentuhan langsung dengan masyarakat sudah membangun hubungan interpersonal yang dibangun sejak tahun pertama pelaksanaan PDPT yang kemudian dilanjutkan hingga tahun ketiga.

Hubungan interpersonal tersebut terbukti sangat mendukung pelaksanaan program PDPT ditandai dengan terciptanya hubungan kekeluargaan antara masyarakat dengan pemerintah. Selain hubungan interpersonal, pelatihan yang sering diadakan secara tidak langsung menciptakan jalinan komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu mendukung pelaksanaan program PDPT di Kabupaten Kendal sehingga tercipta transmisi informasi yang baik antar pihak yang terlibat.

B.4. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana menunjuk pada seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi. Dalam program PDPT, karakteristik agen pelaksana dapat dilihat dari struktur birokasinya yang mencakup 2 hal yakni struktur organisasi pelaksana dan mekanisme yang berkaitan dengan SOP (*Standard Operating Procedure*). Selama pelaksanaan program PDPT di Kabupaten Kendal dari tahun 2012-2014 terdapat perbedaan struktur organisasi

pelaksana PDPT tahun 2012-2013 dengan struktur organisasi PDPT pada tahun 2014. Letak perbedaan tersebut terletak pada keikutsertaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten pada implementasi PDPT tahun 2014. Keikutsertaan organisasi TKPK tersebut memperkuat implementasi program PDPT di Kabupaten Kendal, karena ikut sertanya TKPK tersebut memperkuat koordinasi dengan Tim Teknis berkaitan dengan pelaksanaan program kebijakan penanggulangan kemiskinan. Hal ini ditujukan agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan kewenangan antar instansi pemerintahan yang melaksanakan program kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.

Berkaitan dengan ketersediaan SOP, dalam implementasi program PDPT di Kabupaten Kendal sendiri sudah ada SOP sebagai petunjuk pelaksanaan program. SOP tersebut dalam bentuk Pedoman Teknis pelaksanaan PDPT yang terbit setiap tahunnya oleh pemerintah pusat.

B.5. Disposisi Implementator

Disposisi merupakan sikap pelaksana program atau implementator program terhadap *target groups* dalam implementasi program PDPT. Dalam pelaksanaan program PDPT dari tahun 2012-2014, implementator program PDPT menempatkan KMP sebagai *target groups*, yang mana KMP adalah sasaran utama dalam segala kegiatan PDPT. Hal ini dibuktikan melalui pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis dan BLM ditujukan kepada masyarakat (KMP penerima BLM). Komitmen pelaksana program PDPT di Kabupaten Kendal dalam pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan sangat mendukung dengan melaksanakan kegiatan PDPT dengan baik sesuai petunjuk teknis. Selain itu implementator PDPT cukup demokratis dalam melaksanakan program, dilihat dari adanya sarana pengaduan masyarakat yang sudah tersedia.

Sikap kejujuran pelaksana sudah jujur dalam melaksanakan program. Hal ini terlihat dari publikasi pemerintah kepada masyarakat melalui media masa dan kegiatan lokakarya yang dilaksanakan setiap tahunnya.

B.6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Kondisi lingkungan masyarakat sangat mendukung untuk dilaksanakan program PDPT, karena kerusakan infrastruktur dan lingkungan yang sudah memprihatinkan perlu adanya tindakan perbaikan. Kondisi sosial masyarakat juga mendukung keberhasilan program PDPT terlihat dari swadaya masyarakat dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur. Namun disisi lain terdapat kelemahan terkait dengan pemahaman dan keterampilan masyarakat terhadap teknis kegiatan dan mengatur keuangan. Akibatnya terdapat perbedaan kualitas infrastruktur yang telah terbangun.

Disisi lain, kondisi Ekonomi dan Politik masyarakat kurang mendukung pelaksanaan program PDPT. Dari kegiatan Bina Usaha dan Sumberdaya terdapat permasalahan terkait bubarnya organisasi kelompok. Permasalahan ini ditimbulkan karena lemahnya organisasi KMP. Hal ini disebabkan karena kurangnya persiapan dari pemerintah dalam membentuk kelompok masyarakat. Pembentukan KMP program PDPT lebih terlihat semata-mata dalam rangka akan ada bantuan dan lebih terkesan untuk mengejar target serapan anggaran. Sehingga permasalahan tersebut yang menimbulkan lemahnya organisasi kelompok dan lemahnya dukungan kelompok untuk keberlanjutan program PDPT. Pemerintah sebagai penyusun kebijakan seharusnya tidak semata mengejar target serapan anggaran, namun juga mengejar target peningkatan ketercapaian manfaat yang diberikan kepada masyarakat serta keberlanjutan pembangunan (*Sustainability Development*).

B.7. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program PDPT di Kabupaten Kendal

Faktor pendukung Implementasi program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh di Kabupaten Kendal adalah:

1. Adanya komitmen dari Bupati dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk ikut serta bersatu dalam tim teknis sehingga memudahkan dalam koordinasi dalam pelaksanaan program PDPT selama 3 tahun di Kabupaten Kendal.

2. Adanya peran serta aktif dari mitra bahari, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan dan media masa mendorong keberhasilan implementasi program PDPT.
3. Tersedianya sumber daya manusia (SDM) Tenaga Pendamping yang kompeten di bidangnya sehingga memudahkan dalam proses pendampingan kepada seluruh KMP di masing-masing desa.
4. Sifat kebijakan yang bottom up, sehingga mencerminkan praktik pengambilan keputusan yang partisipatif dari masyarakat. Keputusan dalam perencanaan PDPT merupakan cerminan dari kebutuhan yang diinginkan masyarakat, pemerintah hanya sebagai fasilitator dalam program PDPT. Hal ini mendorong keterlibatan dan komitmen sepenuhnya dari masyarakat untuk melaksanakannya.
5. Program PDPT direncanakan, dilaksanakan dan di awasi sendiri oleh masyarakat. Sehingga masyarakat sendiri yang menentukan keberhasilan program PDPT.
6. Pelibatan peran serta dari perempuan dalam hal pengambilan keputusan, pelaksanaan serta pengawasan merupakan cerminan adanya kesetaraan gender untuk ikut serta sebagai agen pembangunan.
7. Tersedianya sarana pengaduan masyarakat (Complain Handling Unit) yang dapat ditujukan langsung kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jawa Tengah dan Ditjen KP3K, sehingga mendorong terwujudnya transparansi dalam pelaksanaan PDPT di Kabupaten Kendal.

Setelah melihat faktor pendukung diatas, terdapat beberapa faktor penghambat dalam implementasi program PDPT di Kabupaten Kendal. Informasi tersebut dihimpun dari berbagai temuan yang ada di lapangan. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Adanya keterlambatan dalam pengeluaran petunjuk teknis dari pusat setiap tahunnya sehingga menghambat jalannya PDPT

2. Masih minimnya keterampilan, pengetahuan dari sumber daya manusia KMP, sehingga tidak semua anggota KMP paham akan teknis kegiatan
3. Tidak tersedianya anggaran pasca program dari pemerintah pusat maupun daerah membatasi ruang gerak dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan pembinaan KMP untuk keberlanjutan kegiatan pasca berakhirnya program PDPT
4. Pembentukan KMP terkesan hanya dalam rangka akan ada bantuan, sehingga ini mendorong lemahnya organisasi KMP
5. Lemahnya organisasi KMP berdampak pada bubarnya organisasi KMP di akhir program yang membuat arah program untuk pemberdayaan kelompok bergeser kepada pemberdayaan individu

C. PENUTUP

C.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dari analisis data yang dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum implementasi program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) selama 3 tahun di Kabupaten Kendal, telah berjalan cukup baik hal ini dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan penduduk melalui UMKM dan perbaikan kualitas infrastruktur masyarakat di 3 desa lokasi PDPT. Namun disisi lain terdapat hambatan terkait dengan keterlambatan pengeluaran petunjuk teknis dari pusat, minimnya keterampilan dan pengetahuan masyarakat akan teknis kegiatan. Selain itu bubarnya sebagian besar organisasi KMP Bina Usaha yang sudah terbentuk membuat tujuan program untuk pemberdayaan kelompok menjadi tidak terpenuhi.

Dalam mengatasi hambatan tersebut, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal sudah mengambil langkah dengan sosialisasi, pelatihan, dan menilai sejauh mana perkembangan dan keberlanjutan organisasi kelompok. Sehingga dari penilaian itu diketahui berapa KMP Bina Usaha yang sudah

berkembang dan masih mempertahankan kelembagaan kelompoknya, dan KMP yang dianggap layak direkomendasikan kepada pusat untuk diberikan bantuan lanjutan untuk permodalan agar usaha semakin berkembang.

C.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka diperlukan rekomendasi dan langkah-langkah yang mungkin dapat diambil guna mencapai keberhasilan implementasi program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh di Kabupaten Kendal. Rekomendasi dan langkah-langkah yang mungkin diambil adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah pusat perlu memberikan dukungan penuh berupa alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pasca program agar tercipta implementasi program secara utuh dan pembinaan-pembinaan guna keberlanjutan program di wilayah desa pesisir di Kabupaten Kendal
2. Diperlukan persiapan, sosialisasi dan pelatihan yang matang sebelum program benar-benar dilaksanakan, agar masyarakat memahami bagaimana teknis pelaksanaan program tersebut
3. Diperlukan keseriusan dan komitmen yang tinggi dari semua pihak untuk bersinergi dalam membangun desa pesisir, agar dalam pelaksanaannya tidak terkesan hanya untuk mengejar target serapan anggaran semata.
4. Riset berikutnya yang perlu dilakukan yaitu membuat perbandingan pelaksanaan program PDPT di satu Kabupaten dengan Kabupaten lainnya agar memperoleh hasil pelaksanaan program PDPT yang menyeluruh sehingga dapat dijadikan bahan referensi dalam membangun wilayah pesisir di Kabupaten Kendal yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. (2012). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta
Anderson, James E. (1984). Public Policy Making. New York: Holt, Rinehart and Winston

- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Danim, Sudarwan. (2005). *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Dunn, William N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Dwiyanto, Indiahono. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: IKAPI DIY
- Handoko, T Hani. (2009). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Harrison, Lisa. (2007). *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Hosio, JE. (2006). *Kebijakan Publik dan Desentralisasi Esai-Esai dari Sorong*. Yogyakarta: LaksBang Yogyakarta
- Islamy, M Irfan. (1998). *Prinsip-Prinsip Perumusan kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bina Aksara
- Moleong, J Lexy. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nawawi, Ismail. (2009). *Public Policy; Analisis, Strategi, Advokasi, Teori, dan Praktek*. Surabaya: PMN
- Nugroho D, Riant. (2009). *Public Policy (Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi)*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Pabundu Tika, Moh, (2005). *Metode Penelitian Geografi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Persons, Wayne. (2005). *Public Policy: Pengantar, Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana
- Rustiadi, E., Hakim, S.S, & Panuju, D.R. (2001). *Perencanaan dan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor
- Salim, Agus. (2006). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, Buku Sumber untuk Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sinulingga, Budi. (2005). *Pembangunan Kota Tinjauan Lokal dan Regional*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Suharto, Edi. (2005). *Analisis Kebijakan Publik; Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: CV. Alfabeta
- Subarsono, AG. (2006). *Analisis Kebijakan: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sumodiningrat, Gunawan. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat & JPS*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka
- Tayibnapis & Farida, Y. (2000). *Evaluasi Program*. Jakarta: Rineka Cipta

Wasistiono, S & Tahir, I.M. (2007). Prospek Pengembangan Desa. Bandung: Fokusmedia

Wibawa, Samudra. (2001). Studi Implementasi Kebijakan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Zuriyah, Nurul. (2006). Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan. Jakarta: Avyrous

Sumber Jurnal:

Ode Sofyan Hardi. (2010). Implementasi Model Pembangunan Perdesaan dalam Peningkatan Pembangunan Desa Tertinggal. Jurnal Pembangunan Desa. Universitas Islam 45 Bekasi

Kuntoro Boga Andi. (2006). Perspektif Pembangunan Wilayah Pedesaan. Jurnal Nasional. Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian RI

Sumber Internet:

http://diskanlut-jateng.go.id/2013/index.php/read/kp3k/desa_kelautan_detail/27, diakses tanggal 8 April 2014, pukul 09.05 wib

<http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/c/8645/KKP-Beri-Bantuan-untuk-Desa-Pesisir/>, diakses tanggal 8 April 2014, pukul 09.05 wib

<http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/c/6699/IPB-Kementerian-Kelautan-dan-Perikanan-kerja-sama/>, diakses tanggal 8 April 2014, pukul 09.05 wib

<http://pdpt-kkp.org/>, diakses tanggal 2 Oktober 2013, pukul 13.55 wib

Sumber Lain:

Buletin PDPT 2014

Pedoman Teknis Pengembangan Desa Pesisir Tangguh 2012

Pedoman Teknis Pengembangan Desa Pesisir Tangguh 2013

Pedoman Teknis Pengembangan Desa Pesisir Tangguh 2014